



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI SUWARSINI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 953148

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **6.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 620 m2/534 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 2.742 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 2.890.000.000
3. Tanah Seluas 1.618 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000
4. Tanah Seluas 2.480 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
5. Tanah Seluas 2.289 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 315.000.000
6. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 205.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **85.000.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1,5 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **671.654.040**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	1.354.175.254
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	83.186.537
F. HARTA LAINNYA	Rp.	85.865.156
Sub Total	Rp.	8.979.880.987
III. HUTANG	Rp.	1.030.662.003
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.949.218.984

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.